PENGARUH PMDN, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

GUSTI NANDI
NIM. B1011211217

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: Gusti Nandi
NIM	: B1011211217
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Judul TA	: Pengaruh PMDN, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya,

Pontianak, 10 Juli 2025



Gusti Nandi

NIM. B1011211217

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Gusti Nandi
NIM	:	B1011211217
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:	Pengaruh PMDN, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 10 Juli 2025



Gusti Nandi
NIM. B1011211217

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh PMDN, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

Gusti Nandi
B1011211217

Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA)	:	25 Juni 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Romi Suradi, S.E.I., M.E. NIP 198610022019031004	9 Juli 2025	
2.	Ketua Penguji	Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si. NIP 196205251987031002	8 Juli 2025	
3.	Anggota Penguji	Dr. Wahyudi, S.E., M.Si. NIP 196312091989031004	2 Juli 2025	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 15 JUL 2025
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir yang berjudul "Pengaruh PMDN, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat" dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan ini merupakan syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak yang telah membantu serta memberikan saran masukan yang berharga. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, ayah saya Masudi dan ibu saya Asmawati. Atas jasa dan kasih sayang yang begitu besar, rasanya tidak cukup hanya dengan ucapan terima kasih. Namun, dalam kesempatan ini, izinkan saya menempatkan ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu di urutan pertama sebagai wujud penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga atas segala dukungan dan doa yang diberikan kepada saya.
2. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Yanto, S.E., M.Sc., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak Romi Suradi, S.E.I., M.E., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, saran, pemikiran, bimbingan, semangat dan dorongan kepada saya sehingga penulisan tugas akhir ini dapat berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si., dan Bapak Dr. Wahyudi, S.E., M.Si., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan masukan yang sangat berharga. Saran dan kritik yang diberikan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan banyak ilmunya kepada saya, khususnya dosen-dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Seluruh Staf Akademik, Perpustakaan, dan Tata Usaha, serta seluruh karyawan di Universitas Tanjungpura, khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

9. Kakek dan nenek saya, serta saudara-saudari saya: Sandi, Pandi, Windi, Wana, Jekky, dan seluruh keluarga di kampung. Terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang senantiasa mengiringi perjuangan saya dalam menyelesaikan pendidikan ini.
10. Teman-teman organisasi: FORUM MAHASISWA ILMIAH, BEM KABINET ABISATYA ASA, TAX CENTER COMMUNITY. Merupakan pengalaman yang luar biasa dapat bertemu, tumbuh, dan berkembang bersama kalian demi menggapai masa depan yang diimpikan. *Sukses selalu kawan!*
11. Seluruh teman-teman Program Studi Ekonomi Pembangunan angkatan 2021, khususnya kelas D, serta rekan-rekan magang di PT Sarana Kalbar Ventura dan BAPPEDA Kota Pontianak. Kebersamaan selama menjadi mahasiswa merupakan salah satu pengalaman terindah dalam hidup saya. Kita telah berjuang bersama, bekerja sama, berkembang demi satu tujuan: yaitu, MASA DEPAN. *Semoga perjuangan kita selama ini memberikan hasil terbaik seperti yang kita harapkan.*
12. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang membaca karya ini. Terima kasih telah membuka setiap lembaran dalam penelitian saya. Semoga penelitian yang sedang Anda lakukan juga dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan penuh kerendahan hati, saya berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Ekonomi, serta menjadi referensi bagi instansi terkait dan penelitian selanjutnya. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan penelitian ini kedepannya.

Pontianak, 20 Juli 2025



Gusti Nandi
NIM. B1011211217

PENGARUH PMDN, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRACT

This study aims to examine the effects of Domestic Investment (PMDN), the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), and the Village Fund on poverty in districts of West Kalimantan Province. This research adopts a quantitative causal approach. The study covers 12 districts within West Kalimantan Province. The data used are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS), the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP), and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, covering the period from 2015 to 2024. The analysis was conducted using panel data regression with a Fixed Effects Model (FEM) approach. The results show that, partially, PMDN has a negative but statistically insignificant effect on poverty. Meanwhile, DAU and the Village Fund have a negative and significant effect, while the DAK has a positive and significant effect. Simultaneously, all four variables have a statistically significant effect on poverty.

Keywords: *Domestic Investment, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Village Fund, Poverty*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa terhadap kemiskinan di kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Bentuk dari penelitian ini yaitu kuantitatif kausalitas. Objek penelitian mencakup 12 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan periode data tahun 2015 hingga 2024. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, PMDN berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, Sementara itu, DAU dan Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan DAK berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Kata Kunci: Penanaman Modal Dalam Negeri, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, Kemiskinan

PENGARUH PMDN, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh: Gusti Nandi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Kemiskinan memiliki dampak yang luas, baik bagi individu itu sendiri, maupun negara. Bagi individu, salah satunya menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin. Sementara itu, bagi negara akan berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak, karena masyarakat miskin tidak dapat dikenai pajak penghasilan. Mengingat dampaknya yang begitu besar, pemerintah nasional menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 0,5-0,8% pada tahun 2045.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pusat menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya melalui transfer fiskal. Terdapat perbedaan implementasi kebijakan tersebut antara kota dan kabupaten. Keduanya menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), namun Dana Desa hanya diberikan kepada kabupaten yang memiliki wilayah administrasi desa, sehingga data yang diuraikan hanya sebatas kabupaten. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang berperan dalam pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) oleh Ragnar Nurkse (1953) dalam Kuncoro (2006), menekankan tentang pentingnya modal dalam mengatasi kemiskinan. Kekurangan modal menjadi penyebab utama sulitnya masyarakat keluar dari kemiskinan. Pandangan ini sejalan dengan teori Harrod-Domar dalam Todaro & Smith (2011), yang menekankan pentingnya investasi atau modal tambahan sebagai pendorong pembangunan dan penurunan kemiskinan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kemiskinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.

2. Permasalahan

1. Bagaimanakah pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap kemiskinan di kabupaten di Kalimantan Barat?

2. Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemiskinan di kabupaten di Kalimantan Barat?
3. Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemiskinan di kabupaten di Kalimantan Barat?
4. Bagaimanakah pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan di kabupaten di Kalimantan Barat?

3. Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap kemiskinan di kabupaten di Kalimantan Barat?
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemiskinan di kabupaten di Kalimantan Barat.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemiskinan di kabupaten di Kalimantan Barat.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan di kabupaten di Kalimantan Barat.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Objek penelitian mencakup 12 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Kota Pontianak dan Kota Singkawang dikecualikan. Data yang digunakan merupakan data sekunder pada periode 2015 hingga 2024. Penelitian ini melakukan uji stasioneritas untuk memastikan bahwa data tidak mengandung akar unit. Kemudian, dilakukan Chow dan Hausman untuk menentukan model terbaik yang digunakan dalam analisis. Untuk memastikan data memenuhi asumsi klasik, dilakukan dua pengujian, yaitu uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Selanjutnya, dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial.

5. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menyatakan bahwa model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dan telah memenuhi uji asumsi klasik. Oleh karena itu, dilanjutkan dengan pengujian regresi data panel yang menunjukkan bahwa PMDN berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan; DAU dan Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan; serta DAK berpengaruh positif signifikan. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki potensi untuk menekan kemiskinan di kabupaten-kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, namun dampaknya belum terlihat secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh distribusi investasi yang belum merata, nilai investasi yang fluktuatif, serta manfaat yang

belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif. Dana Alokasi Umum (DAU) terbukti cukup efektif dalam menurunkan kemiskinan, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memanfaatkan dana tersebut dengan baik. Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) belum memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi kemiskinan, karena alokasinya lebih difokuskan pada infrastruktur serta layanan pendidikan dan kesehatan, tanpa banyak menyentuh program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Sementara itu, Dana Desa berperan signifikan dalam menurunkan kemiskinan, di mana peningkatan alokasinya secara langsung berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan dana yang diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, disarankan agar pemerintah daerah menyederhanakan regulasi yang berkaitan dengan investasi serta memastikan bahwa investasi mampu menyerap tenaga kerja lokal dengan upah yang sesuai Upah Minimum Rupiah (UMR), sehingga PMDN dapat lebih optimal dalam mengurangi kemiskinan. Pemerintah pusat juga perlu memperkuat sistem evaluasi terhadap pengelolaan DAU dan DAK, terutama dalam memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun dalam pelaksanaan Dana Desa, dibutuhkan inovasi dalam perencanaan dan implementasi program agar dampak yang dirasakan lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT i
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR ii
LEMBAR YURIDIS iii
UCAPAN TERIMAKASIH iv
ABSTRAK vi
RINGKASAN vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
ABSTRAK 1

1. PENDAHULUAN 2
2. KAJIAN LITERATUR 7
   2.1 Kemiskinan 7
   2.2 Modal Keuangan 8
   2.3 Kajian Empiris 9
   2.4 Kerangka Konseptual dan Hipotesis 11
3. METODE PENELITIAN 11
   3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 11
   3.2 Metode dan Alat Analisis 12
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 13
   4.1 Hasil Penelitian 13
   4.2 Pembahasan 16
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 19
   5.1 Kesimpulan 19
   5.2 Rekomendasi 20

DAFTAR RUJUKAN 21

LAMPIRAN 23

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (miliar rupiah) 3
Tabel 1.2 Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (miliar rupiah) 4
Tabel 1.3 Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (miliar rupiah) 5
Tabel 1.4 Jumlah Dana Desa menurut Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (miliar rupiah) 6
Tabel 4.1 Hasil Uji Stasioner ADF Fisher Chi-square 13
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow dan Hausman 14
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas 14
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 14
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Data Panel 15
Tabel 4.6 Hasil Uji t 15
Tabel 4.7 Hasil Uji F 16
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi 16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase penduduk miskin menurut kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (ribu jiwa) 2
Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan 7
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 11

PENGARUH PMDN, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Gusti Nandi[1]
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to examine the effects of Domestic Investment (PMDN), the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), and the Village Fund on poverty in districts of West Kalimantan Province. This research adopts a quantitative causal approach. The study covers 12 districts within West Kalimantan Province. The data used are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS), the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP), and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, covering the period from 2015 to 2024. The analysis was conducted using panel data regression with a Fixed Effects Model (FEM) approach. The results show that, partially, PMDN has a negative but statistically insignificant effect on poverty. Meanwhile, DAU and the Village Fund have a negative and significant effect, while the DAK has a positive and significant effect. Simultaneously, all four variables have a statistically significant effect on poverty.

Keywords: *Domestic Investment, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Village Fund, Poverty*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa terhadap kemiskinan di kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Bentuk dari penelitian ini yaitu kuantitatif kausalitas. Objek penelitian mencakup 12 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan periode data tahun 2015 hingga 2024. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, PMDN berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, Sementara itu, DAU dan Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan DAK berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

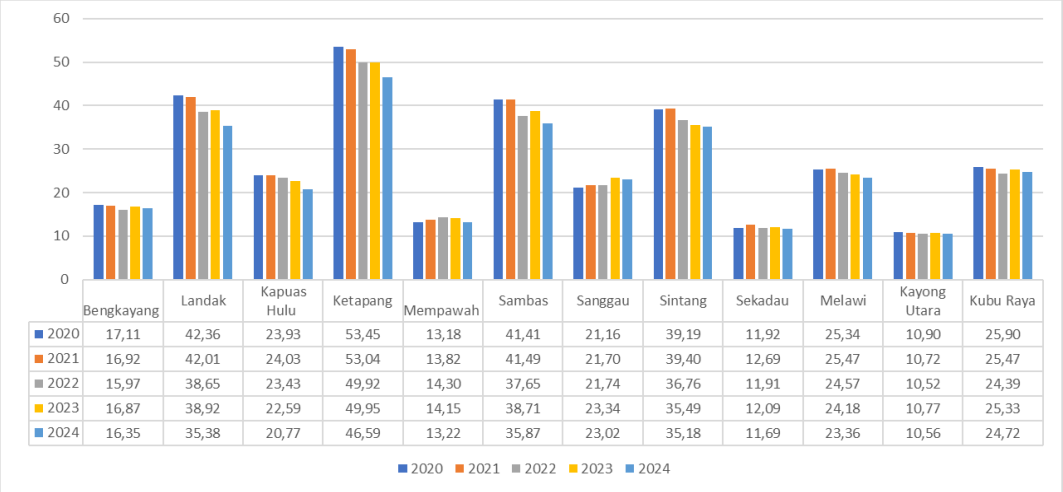
Kata Kunci: Penanaman Modal Dalam Negeri, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, Kemiskinan

[1] b1011211217@student.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan berkelanjutan, serta menjadi tantangan besar bagi banyak daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Barat. Di Indonesia, seseorang digolongkan sebagai penduduk miskin apabila tidak mampu memenuhi garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Muttaqien (2006) dalam Hermawati (2012) menyebutkan bahwa kemiskinan dapat menimbulkan berbagai akibat, di antaranya: (1) menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin, terutama terkait kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; (2) ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak secara manusiawi; (3) hilangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan; (4) termarjinalkannya hak atas perlindungan hukum; (5) hilangnya rasa aman; (6) terganggunya kesehatan mental; (7) terbatasnya ruang untuk berinovasi; (8) hilangnya peluang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik; serta (9) terbatasnya kebebasan hidup. Kemiskinan juga berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak. Penghasilan penduduk miskin berada di bawah batas kena pajak, sehingga mereka tidak berkewajiban membayar pajak penghasilan. Oleh karena itu, penerimaan negara dari sektor pajak yang dipungut dari warga negara tidak maksimal.

Melihat dampak kemiskinan yang meluas pada berbagai aspek, baik kehidupan penduduk miskin maupun bagi bangsa dan negara, menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Dalam kerangka visi besar Indonesia Emas 2045, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 0,5-0,8% pada tahun 2045. Walaupun demikian, saat ini tren kemiskinan di setiap daerah di Indonesia menunjukkan penurunan yang melambat, salah satunya di Provinsi Kalimantan Barat.



	Bengkayang	Landak	Kapuas Hulu	Ketapang	Mempawah	Sambas	Sanggau	Sintang	Sekadau	Melawi	Kayong Utara	Kubu Raya
2020	17,11	42,36	23,93	53,45	13,18	41,41	21,16	39,19	11,92	25,34	10,90	25,90
2021	16,92	42,01	24,03	53,04	13,82	41,49	21,70	39,40	12,69	25,47	10,72	25,47
2022	15,97	38,65	23,43	49,92	14,30	37,65	21,74	36,76	11,91	24,57	10,52	24,39
2023	16,87	38,92	22,59	49,95	14,15	38,71	23,34	35,49	12,09	24,18	10,77	25,33
2024	16,35	35,38	20,77	46,59	13,22	35,87	23,02	35,18	11,69	23,36	10,56	24,72

Gambar 1.1 Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten di Kalimantan Barat tahun 2020-2024 (ribu jiwa)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang mengalami perubahan yang fluktuatif sepanjang periode 2021-2024. Pada 2021, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 16,92 ribu jiwa, kemudian menurun menjadi 15,97 ribu jiwa pada 2022, berkurang sekitar 950 jiwa. Pada 2023, jumlah tersebut kembali meningkat sebesar 900 jiwa menjadi 16,87 ribu jiwa. Selanjutnya pada 2024, terjadi penurunan sebanyak 520 jiwa sehingga jumlah penduduk miskin mencapai 16,35 ribu jiwa. Pola perubahan yang tidak stabil ini juga terjadi di kabupaten lain selama periode yang sama. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kenaikan garis kemiskinan, rendahnya penyerapan tenaga kerja, serta faktor ekonomi lainnya yang saling berkaitan.

Untuk mengurangi angka kemiskinan, pemerintah pusat telah menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya melalui mekanisme transfer fiskal. Terdapat perbedaan implementasi kebijakan tersebut antara kota dan kabupaten. Baik kabupaten maupun kota menerima transfer fiskal berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sementara Dana Desa hanya disalurkan kepada kabupaten yang memiliki wilayah administrasi berupa desa, sehingga data yang diuraikan hanya sebatas kabupaten. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi dengan sektor swasta melalui investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi ini berperan penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian lokal, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Wulandari dkk., 2022).

Tabel 1.1 Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

Kabupaten	Realisasi Investasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (miliar rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkayang	913.80	405.27	56.62	178.38	724.06
Landak	122.76	479.74	875.92	1.624.53	754.81
Kapuas Hulu	930.27	452.80	1.430.58	159.87	694.04
Ketapang	833.10	1.481.47	125.45	3.056.65	1969.18
Mempawah	4.476.49	5.265.39	264.09	4.769.52	4559.57
Sambas	339.42	241.10	434.45	581.96	481.88
Sanggau	323.45	300.98	1.368.69	975.40	1273.04
Sintang	449.87	499.55	572.43	1.364.55	795.22
Sekadau	207.71	244.73	885.78	114.30	856.75
Melawi	45.16	33.62	2.155.88	96.16	461.92
Kayong Utara	-	157.52	330.55	227.43	49.64
Kubu Raya	451.57	961.19	210.48	1.004.92	1268.62

Sumber : BPS & DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat (data diolah)

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, selama lima tahun terakhir tercatat bahwa proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) telah menyerap sekitar 58.909 tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja ini diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah dan pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan (Agustini & Kurniasih, 2017). Merujuk pada Tabel 1.1, nilai PMDN di setiap kabupaten menunjukkan pola yang fluktuatif, yang disebabkan oleh perbedaan potensi daerah dalam menarik investasi. Sebagai contoh, Kabupaten Mempawah mencatatkan total PMDN tertinggi selama lima tahun terakhir dibandingkan kabupaten lainnya, yakni sebesar Rp15.214,25 miliar. Capaian ini sejalan dengan adanya berbagai proyek besar di wilayah tersebut, seperti pembangunan Pelabuhan Kijing dan Smelter Alumina. Namun, pada tahun 2022, nilai PMDN di Mempawah mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya maupun setelahnya. Kondisi ini berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin di Mempawah sebanyak 480 jiwa, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1, karena menurunnya investasi berdampak pada berkurangnya peluang kerja.

Sementara itu, Kabupaten Kayong Utara mencatatkan nilai PMDN terendah dalam lima tahun terakhir, dengan total investasi sebesar Rp731,65 miliar. Pada tahun 2020, tidak terdapat tambahan investasi yang masuk ke wilayah tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah perubahan regulasi dan prosedur perizinan, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan kepada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kayong Utara. Meskipun demikian, pada tahun 2025, Kayong Utara diproyeksikan menerima Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa pembangunan smelter alumina di pulau Penebang, yang berpotensi meningkatkan nilai investasi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Di sisi lain, peningkatan PMDN di beberapa kabupaten tidak selalu sejalan dengan penurunan angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi belum tentu memberikan dampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan, tergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola dan mengarahkan investasi tersebut untuk mendukung program pengentasan kemiskinan.

Tabel 1.2 Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

Kabupaten	Jumlah Dana Alokasi Umum				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkayang	547.39	543.07	543.57	578.33	630.82
Landak	611.31	608.48	608.63	655.53	720.64
Kapuas Hulu	900.43	891.10	893.02	924.28	988.01
Ketapang	1.040.65	1.032.25	1.034.13	1.091.07	1.161.36
Mempawah	539.55	531.64	531.67	556.89	588.90
Sambas	813.95	803.74	804.34	884.77	1.011.17
Sanggau	747.18	740.41	741.78	790.87	864.00
Sintang	843.50	837.19	838.16	891.50	967.17
Sekadau	467.31	463.85	464.25	485.42	520.67
Melawi	557.38	553.17	554.28	573.68	593.08
Kayong Utara	447.78	444.91	445.77	464.00	473.19
Kubu Raya	726.71	718.35	719.09	788.99	896.88

Sumber: DJPK Kemenkeu RI, Portal Data SIKD (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2, sepanjang periode 2021 hingga 2024, seluruh kabupaten mengalami peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) secara konsisten. Kabupaten Ketapang mencatatkan alokasi DAU tertinggi, yang disebabkan oleh luas wilayahnya yang merupakan terbesar di Kalimantan Barat. Seiring dengan peningkatan alokasi DAU tersebut, terdapat dinamika dalam tingkat kemiskinan di masing-masing kabupaten. Merujuk pada Gambar 1.1, hanya Kabupaten Landak yang mencatat penurunan kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan kabupaten lainnya, dengan total penurunan sekitar 6.630 jiwa selama periode 2021 ke 2024. Sebaliknya, Kabupaten Sanggau justru mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin sekitar 1.320 jiwa pada periode yang sama.

Untuk meminimalisir kejadian serupa, pemerintah telah mengatur penggunaan DAU menjadi dua kategori, yakni DAU yang penggunaannya tidak ditentukan oleh pemerintah pusat dan DAU yang penggunaannya ditentukan. Pengaturan ini bertujuan agar penggunaan DAU dapat lebih terarah untuk mendukung pembangunan daerah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya di daerah yang tahun sebelumnya belum maksimal. Berdasarkan publikasi Dana Perimbangan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2024, rata-rata proporsi DAU yang penggunaanya tidak ditentukan di setiap kabupaten di Kalimantan Barat mencapai sekitar 76,40% dari total DAU yang diterima, sedangkan DAU yang sebesar 23,60% merupakan DAU dengan penggunaannya yang telah ditentukan. Adapun dari porsi DAU yang ditentukan, kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dialokasikan melalui beberapa sektor, yaitu bidang pendidikan sebesar 12,08%, kesehatan 3,76%, dan pekerjaan umum sebesar 3,86%. Sisanya digunakan untuk

penggajian formasi PPPK sebesar 3,82% dan pendanaan desa sebesar 0,08%. Distribusi ini menunjukkan bahwa porsi DAU yang secara langsung mendukung pengentasan kemiskinan masih tergolong terbatas, sementara porsi DAU yang dapat digunakan secara fleksibel oleh pemerintah kabupaten untuk berbagai keperluan relatif lebih besar. Oleh karena itu, meskipun secara umum terjadi peningkatan alokasi DAU, tren kemiskinan di setiap kabupaten dapat menunjukkan pola yang berbeda, tergantung pada seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan dana tersebut. Semakin optimal penggunaan DAU dalam program-program pengentasan kemiskinan, semakin besar peluang untuk menurunkan kemiskinan di wilayah tersebut.

Tabel 1.3 Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

Kabupaten	Jumlah Dana Alokasi Khusus				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkayang	173.97	172.37	235.50	342.63	242.73
Landak	300.87	213.52	315.16	283.66	291.85
Kapuas Hulu	261.30	318.54	227.25	260.26	308.28
Ketapang	380.33	425.58	403.85	386.48	407.83
Mempawah	134.25	162.31	184.09	184.49	232.51
Sambas	338.18	412.77	384.83	388.41	506.44
Sanggau	221.66	230.02	247.63	316.26	292.61
Sintang	319.75	357.10	297.66	354.10	347.01
Sekadau	107.59	111.88	147.09	155.62	134.10
Melawi	135.92	177.44	172.38	246.01	197.58
Kayong Utara	118.80	184.25	136.24	139.84	127.72
Kubu Raya	214.31	250.73	324.61	362.66	333.93

Sumber: DJPK Kemenkeu RI, Portal Data SIKD (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3, perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK) di setiap kabupaten menunjukkan pola yang fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat optimalisasi DAK di masing-masing kabupaten serta adanya faktor-faktor lain, seperti penetapan kabupaten tertentu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang mendorong peningkatan alokasi DAK. Terlepas dari faktor-faktor tersebut, Kabupaten Landak menjadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan Barat yang mengalami penurunan alokasi DAK dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar Rp9,02 miliar dari tahun 2020 ke 2024. Sebaliknya, kabupaten-kabupaten lain justru mencatatkan peningkatan DAK yang cukup signifikan, dengan Kabupaten Sambas mencatat kenaikan tertinggi sebesar Rp168,26 miliar pada periode yang sama.

Namun demikian, peningkatan alokasi DAK tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan Gambar 1.1, Kabupaten Landak justru mencatat penurunan jumlah penduduk miskin terbesar, yakni sebanyak 6.980 jiwa, meskipun mengalami penurunan alokasi DAK. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Landak mampu mengelola dan memanfaatkan dana tersebut lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya dalam menekan angka kemiskinan. Sebaliknya, Kabupaten Mempawah dan Sanggau justru mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin masing-masing sebanyak 40 dan 1.860 jiwa, walaupun alokasi DAK di kedua kabupaten tersebut meningkat.

Perbedaan ini dipengaruhi oleh perubahan kondisi setiap daerah dari tahun ke tahun, serta efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan dana yang diterima untuk program yang berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah terus mendorong

optimalisasi pemanfaatan DAK dengan menetapkan alokasi penggunaannya. Mengacu pada publikasi Dana Perimbangan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2020-2024, sekitar 59,79% dari total DAK yang diterima setiap kabupaten di Kalimantan Barat dialokasikan untuk berbagai sektor yang berpotensi berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Rinciannya, DAK Fisik mencakup enam infrastruktur dasar, yaitu pendidikan (sekitar 9,39%), kesehatan dan keluarga berencana (sekitar 9,97%), sanitasi (sekitar 2,19%), jalan (sekitar 8,19%), air minum (sekitar 3,04%), serta perumahan dan permukiman (sekitar 0,68%). Sementara itu, DAK Nonfisik mencakup dana BOS Pendidikan (sekitar 15,30%), bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana (sekitar 10,78%), dana peningkatan kapasitas koperasi dan UKM (sekitar 0,06%), serta dana ketahanan pangan dan pertanian (sekitar 0,18%).

Meskipun porsi DAK untuk sektor-sektor tersebut cukup besar, dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan tidak selalu sebanding, karena porsi yang besar cenderung pada pembangunan infrastruktur yang manfaatnya bersifat umum dan dapat dinikmati oleh seluruh penduduk, baik kelompok miskin maupun tidak. Akibatnya, beberapa kabupaten masih menunjukkan tren kemiskinan yang fluktuatif dan relatif tinggi dibandingkan daerah lain. Dengan demikian, diperlukan strategi alokasi dan pemanfaatan DAK yang lebih terfokus langsung pada kelompok miskin agar dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan menjadi lebih nyata.

Tabel 1.4 Jumlah Dana Desa menurut Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

Kabupaten	Jumlah Dana Desa				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkayang	108.86	111.68	104.39	110.07	111.36
Landak	184.03	186.03	165.59	155.61	155.66
Kapuas Hulu	271.33	275.01	249.74	248.77	253.26
Ketapang	260.92	267.55	244.03	253.42	254.24
Mempawah	66.58	69.50	59.67	61.13	61.44
Sambas	202.70	202.46	179.52	184.39	189.75
Sanggau	152.42	158.76	150.97	157.08	159.92
Sintang	348.60	348.53	342.84	341.67	342.24
Sekadau	83.77	87.60	78.11	82.98	88.65
Melawi	156.18	159.48	148.63	152.77	152.95
Kayong Utara	50.92	54.05	40.46	43.97	44.71
Kubu Raya	133.19	136.67	125.71	119.20	125.19

Sumber: DJPK Kemenkeu RI, Portal Data SIKD (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.4, alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing kabupaten menunjukkan tren fluktuatif dari tahun ke tahun, meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Kabupaten Sintang tercatat sebagai penerima Dana Desa tertinggi, sedangkan Kabupaten Kayong Utara menerima alokasi terendah. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik desa, seperti jumlah desa, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, dan tingkat kesulitan aksesnya. Pada pemanfaatan Dana Desa, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) telah menetapkan porsi maksimal 25% dari total Dana Desa yang diterima harus dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Meskipun kebijakan tersebut diterapkan, data pada Gambar 1.1, menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan di sebagian besar kabupaten masih relatif rendah. Pada tahun 2023-2024, banyak kabupaten belum mampu menekan jumlah penduduk miskin hingga seribu jiwa. Padahal Dana Desa yang diterima mengalami peningkatan yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Landak yang mengalami peningkatan terendah namun mampu menurunkan kemiskinan tertinggi, yakni sebanyak 3.540 jiwa.

Kemudian, pada periode 2022–2023, porsi tersebut belum mampu menurunkan angka kemiskinan di sejumlah kabupaten, seperti Bengkayang, Landak, Ketapang, Sambas, Sanggau, Sekadau, Kayong Utara, dan Kubu Raya. Walaupun demikian, pada tahun 2024 pemerintah mulai menunjukkan perbaikan dengan mampu memanfaatkan Dana Desa untuk mengurangi angka kemiskinan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa tercatat sering mengalami peningkatan di setiap kabupaten. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu disertai dengan penurunan kemiskinan di sejumlah kabupaten. Idealnya, keempat dana tersebut diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, pada kenyataannya menunjukkan bahwa hanya sebagian kabupaten yang mampu secara konsisten mengoptimalkan pemanfaatan dana tersebut untuk menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PMDN, DAU, DAK, dan Dana Desa terhadap kemiskinan dengan memfokuskan pada seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.